

# KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/ G/VI.02/HK/2018

#### TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2018

# GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca

Surat Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung perihal usulan Calon Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018;

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018, yang dikelola oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, perlu menunjuk Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan yang bertanggung jawab baik dari segi fisik maupun keuangan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang bersangkutan;
  - b. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan dan Jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018;
  - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, perlu menunjuk Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 menetapkannya dengan Keputusan Lampung;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan tentang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
- 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PENGELUARAN BENDAHARA DAN **BENDAHARA** PENERIMAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN

**KESATU** 

: Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan dan Jabatannya sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, kolom 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, kolom 5 Lampiran Keputusan ini sebagai Bendahara Pengeluaran dan kolom 6 Lampiran Keputusan ini sebagai Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018.

KEDUA

: Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas, kewajiban dan wewenang sebagai berikut:

- Pejabat Pengguna Anggaran:
  - 1. menyusun RKA SKPD;
  - 2. menyusun DPA SKPD;
  - 3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - 4. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  - 5. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - 6. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
  - 7. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - 8. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
  - 9. mengelola piutang utang dan yang tanggungjawab OPD yang dipimpinnya;
  - 10. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab OPD yang dipimpinnya;

- 11. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan OPD yang dipimpinnya;
- 12. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- 13. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran berdasarkan kuasa anggaran yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah; dan
- 14. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;

# b. Kuasa Pengguna Anggaran:

- 1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- 2. melaksanakan anggaran Unit Kerja yang dipimpinnya;
- 3. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- 4. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- 5. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
- 6. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan.
- 7. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran;

# c. Bendahara Pengeluaran:

- 1. melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD diunit kerja Pengguna Anggaran Daerah;
- 2. menyelenggarakan tata pembukuan secara tertib dan teratur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaian nya;
- mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan / tambah uang persediaan kepada Kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- 4. mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- 5. melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara pengeluaran pembantu sekurang-kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas;
- 6. melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban pengeluaran terhadap bendahara pengeluaran pembantu;
- 7. mengelola belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan Keuangan, belanja tidak terduga dan pembiayaan melakukan penatausahaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

- 8. dilarang melakukan baik secara langsung maupun tidak langsung kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan penjualan; dan
- 9. tidak diperkenankan membuka rekening dengan atas nama pribadi pada Bank atau Giro pos dengan tujuan pelaksanaan APBD.

#### d. Bendahara Penerimaan:

- melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD diunit kerja Pengguna Anggaran Daerah;
- 2. menyelenggarakan penatausahaan terhadap penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
- 3. mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-OPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- 4. mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pengguna anggaran melalui PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- 5. setoran yang diterima harus disetorkan kembali melalui rekening kas umum daerah pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
- 6. harus menyetorkan seluruh penerimaan kas ke rekening kas umum daerah, maksimal 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan uang kas;
- 7. dilarang melakukan baik secara langsung maupun tidak langsung kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan penjualan;
- 8. tidak diperkenankan membuka rekening dengan atas nama pribadi pada Bank atau Giro pos dengan tujuan pelaksanaan APBD; dan
- 9. tidak boleh menyimpan uang, cek atau surat berharga lebih dari 1 (satu) hari kerja.

KETIGA

Mendelegasikan wewenang menandatangani petikan dan salinan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 yang ditandatangani Gubernur Lampung kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung.

KEEMPAT:

Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini, mengenai pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**KELIMA** 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Telukbetung pada tanggal 2 - 1 - 2018

GUBERNUR LAMPUNG.

#### M. RIDHO FICARDO

#### Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;

- 2. Kepala Kantor BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
- 3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
   Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung;
- 6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G/ 9 /VI.02/HK/2018 TANGGAL: 2 - 1 - 2018

# DAFTAR NAMA PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA	
NO	NAMA SEPD	PENGGUNA ANGGARAN	RUASA PENGGUNA ANGGARAN	PENGELUARAN	PENERIMAAN
1	2	3	4	5	6
1	Sekretariat Daerah	Ir. SUTONO, M.M.	Drs. ISRON FADTRICAR, M.H.	AGENG PIASTOTO, S.H., M.M.	HENGKY IRAWAN SUSILO
	Provinsi Lampung	NIP. 19580728 198602 1 002	NIP. 19591001 198708 1 001	NIP. 19720709 199203 1 002	NIP. 19800906 200801 1 009
	ļ	Pembina Utama /IVe	Pembina Utama Muda/IVc	Penata/IIIc	Pengatur/IIc
		Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Kepala Biro Umum Sekretariat	Staf Biro Umum Sekretariat Daerah	Staf Biro Perlengkapan dan Aset
	<b>\</b>		Daerah Provinsi Lampung	Provinisi Lampung	Daerah Setda Provinisi Lampung
			(Belanja Tidak Langsung)		
2	Kepala Daerah dan Wakil	Ir. SUTONO, M.M.	Drs. ISRON FADTRICAR, M.H.	AGENG PIASTOTO, S.H., M.M.	
	Kepala Daerah Provinsi Lampung	NIP. 19580728 198602 1 002	NIP. 19591001 198708 1 001	NIP. 19720709 199203 1 002	
		Pembina Utama /IVe	Pembina Utama Muda/IVc	Penata/IIIc	
		Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Kepala Biro Umum Sekretariat	Staf Biro Umum Sekretariat Daerah	
	1		Daerah Provinsi Lampung	Provinisi Lampung	
		,	(Belanja Tidak Langsung)		
3	Sekretariat DPRD	Hi. KHERLANI, S.E., M.M.		DWI ARYANI	
	Provinsi Lampung	NIP. 19620504 198103 1 004		NIP. 19760818 200701 2 023	,
		Pembina Utama/IVe		Pengatur/IIc	
		Sekretaris Dewan Perwakilan		Staf Sub Bagian Keuangan	
		Rakyat Daerah Provinsi Lampung		Sekretariat DPRD Provinsi Lampung	
4	Inspektorat	SYAIFUL DARMAWAN, S.H., M.M.		EMY NOVIANTY IRBA, S.IP., M.IP.	
	Provinsi Lampung	NIP. 19630512 199003 1 006		NIP. 19851130 200412 2 001	
		Pembina Utama Madya/IVd		Penata/IIIc	
		Inspektur Provinsi Lampung		Staf Inspektorat Provinsi Lampung	
1					

NO	NAMA SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA	
NO	NAMA SKFD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PENGELUARAN	PENERIMAAN
1_	2	3	4	5	6
5	Dinas Pendidikan dan	Drs. SULPAKAR, M.M.		MARWIN	LIES KUSUMARINI, S.Sos.
1	Kebudayaan Provinsi Lampung	NIP. 19690205 198910 1 002		NIP. 19710407 201001 1 001	NIP. 19640509 198901 2 002
	1	Pembina Utama Madya/IVd	1	Pengatur Muda Tk.I/IIb	Penata Tk.I/IIId
	!	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	]	Staf Sub Bagian Keuangan	Staf Sub Bagian Keuangan
		Provinsi Lampung		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6	Dinas Kesehatan	Dr. dr. Hj. REIHANA, M.Kes.		PUJI HERNOWO, A.Md.	HERMIN PUJI ASTUTI, S.E.
	Provinsi Lampung	NIP. 19630825 198910 2 002		NIP. 19730830 199403 1 009	NIP. 19691130 199103 2 003
		Pembina Utama Madya/IVd		Penata Muda Tk.I/IIIb	Penata/IIIc
	}	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung		Staf Sub Bagian Keuangan	Staf Sub Bagian Keuangan
				Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
7	Dinas Pekerjaan Umum dan	BUDHI DARMAWAN, S.T., M.T.		HERLANDES, S.E., M.M.	BOY ARISTHA F, S.E.
	Penataan Ruang	NIP. 19720827 199902 1 002		NIP. 19720827 199902 1 001	NIP. 19840227 201001 1 004
	Provinsi Lampung	Pembina Utama Muda/IVc		Penata Muda Tk.I/IIIb	Pengatur Muda Tk. I/IIb
ı		Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan	}	Staf Sub Bagian Keuangan	Staf Sub Bagian Keuangan
	i	Penataan Ruang Provinsi Lampung		Dinas Pekerjaan Umum dan	Dinas Pekerjaan Umum dan
		1		Penataan Ruang Provinsi Lampung	Penataan Ruang Provinsi Lampung
8	Dinas Kependudukan dan	ACHMAD SAEFULLOH, S.H.		ZULFALINA	
l	Pencatatan Sipil Provinsi	NIP. 19691209 201501 1 001		NIP. 19800218 200312 2 005	
	Lampung	Pembina Utama Muda/IVc		Pengatur Tingkat I/IId	
	}	Kepala Dinas Kependudukan dan		Pelaksana Pada Dinas Kependudukan	
		Pencatatan Sipil Provinsi Lampung	1	dan Pencatatan Sipil	
		1		Provinsi Lampung	}
9	  Satuan Polisi Pamong Praja	JAYADI		AGUS SETIAWAN	
	Provinsi Lampung	NIP. 19600627 201604 1 001		NIP. 19770808 200701 1 027	
		Pembina Tk. I/IVb	ì	Pengatur/IIc	
)	]	Kepala Satuan Polisi	1	Staf Satuan Polisi Pamong Praja	
		Pamong Praja Provinsi Lampung		Provinsi Lampung	
		}			

ι .

NO	NAMA SVDD	NAMA SKPD PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BEND	AHARA
	NAME OF D	PENGGUNA ANGGARAN	RUASA FENGGUNA ANGGARAN	PENGELUARAN	PENERIMAAN
1	2	3	4	5	6
10	Dinas Sosial	Drs. SUMARJU SAENI, M.Sc.		HERU SUWITO, S.E., M.S.Ak.	
1	Provinsi Lampung	NIP. 19600110 198803 1 010		NIP. 19790709 200903 1 003	
		Pembina Utama Madya/IVd	}	Penata/IIIc	{
-		Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung	}	Staf Sub Bagian Keuangan	
				Dinas Sosial Provinsi Lampung	
11	Dinas Tenaga Kerja dan	Dra. Hj. SUMIARTI		ZULHAKKI	MAZHABI, S.E.
	Transmigrasi	NIP. 19580508 198301 2 002	{	NIP. 19801029 200903 1 001	NIP.19601212 198302 1 006
1	Provinsi Lampung	Pembina Utama Madya/IVd		Pengatur/IIc	Penata Tk. I/IIId
Ì	1	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan		Staf Dinas Tenaga Kerja dan	Staf Dinas Tenaga Kerja dan
		Transmigrasi Provinsi Lampung		Transmigrasi Provinsi Lampung	Transmigrasi Provinsi Lampung
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan	DEWI BUDI UTAMI, S.E.		HARYANI, S.H.	
	dan Perlindungan Anak	NIP. 19660520 199103 2 003	ļ	NIP. 19751106 200212 2 006	1
Į .	Provinsi Lampung	Pembina Utama Madya/IVd	1	Penata Tk. I/IIId	}
l		Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan	ļ	Staf Dinas Pemberdayaan Perempuan	1
		dan Perlindungan Anak	Į.	dan Perlindungan Anak	}
		Provinsi Lampung		Provinsi Lampung	
13	Dinas Ketahanan Pangan	Ir. KUSNARDI, M. Agr. Ec.		MUCHTAR GUNADI, S.T.	
]	Provinsi Lampung	NIP. 19631123 198803 1 005	[	NIP. 19760222 200604 1 003	<b>\</b>
Ì		Pembina Utama Madya/IVd	Į.	Penata Muda/IIIa	,
1		Kepala Dinas Ketahanan Pangan	{	Staf Sub Bagian Keuangan	1
		Provinsi Lampung		Dinas Ketahanan Pangan	
14	Dinas Lingkungan Hidup	FITTER SYAHBOEDIN, S.E., M.M.		MERITA NINGSIH, S.E., M.M.	WIDYASTUTI APRILIANI, S.E., M.M.
1	Provinsi Lampung	NIP. 19600810 199002 1 001	1	NIP. 19750526 200903 2 005	NIP. 19780428 199703 2 001
1	1	Pembina Utama Madya/IVd	ì	Penata Muda Tk.I/IIIb	Penata/IIIc
}	1	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	}	Staf Sub Bagian Keuangan	Staf Sub Bagian Keuangan
}	1	Daerah Provinsi Lampung	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
1	1		ì	Daerah Provinsi Lampung	Daerah Provinsi Lampung
					1
L_		<u> </u>		ì	

IO	NAMA SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BEND	AHARA
שו	NAMA SRPD	PENGGUNA ANGGARAN	RUASA PENGGUNA ANGGARAN	PENGELUARAN	PENERIMAAN
Ī	2	3	4	5	6
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	Drs. YUDA SETIAWAN, M.M.		NURJASA	
	dan Desa Provinsi Lampung	NIP.19711225 199101 1 001		NIP. 19760315 200701 1 018	
		Pembina Utama Muda/IVc	1	Pengatur/IIc	
		Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat		Staf Sub Bagian Keuangan	
		dan Desa Provinsi Lampung		Dinas Pemberdayaan Masyarakat	İ
				dan Desa Provinsi Lampung	
16	Dinas Perhubungan	Drs. QODROTUL IKHWAN, M.M.		DYAH SUSANTI, S.E.	YATIRAN
	Provinsi Lampung	NIP. 19650107 199402 1 001	1	NIP.19711006 199303 2 006	NIP.19621213 198503 1 007
	1	Pembina Utama Madya/IVd	ļ	Penata/IIIc	Penata Muda Tk.I/IIIb
1		Kepala Dinas Perhubungan	1	Staf Sub Bagian Keuangan	Staf Sub Bagian Keuangan
		Provinsi Lampung		Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	Dinas Perhubungan
17	Dinas Komunikasi, Informatika	Ir. A. CHRISNA PUTRA NR, M.EP.		GUSHANI	
	dan Statistik Provinsi Lampung	NIP. 19610821 198903 1 001	1	NIP. 19630810 198703 2 008	
1		Pembina Utama Madya/IVd		Penata Muda Tk.I/IIIb	
}		Kepala Dinas Komunikasi, Informatika		Staf Dinas Komunikasi, Informatika	1
1		dan Statistik Provinsi Lampung		dan Statistik Provinsi Lampung	
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan	SATRIA ALAM, S.E., M.Si.		WAHYUNI SAMPARA, S.E., M.M.	TRI MARDIANINGSIH, A.Md.
Ì	Menengah Provinsi Lampung	NIP. 19610307 198603 1 007		NIP. 19760806 200212 2 004	NIP. 19810310 201101 2 006
ĺ		Pembina Utama Madya/IVd		Penata Tk. I/IIId	Pengatur Tk. I/IId
}		Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan		Staf Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan	Staf Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
		Menengah Provinsi Lampung		Menengah Provinsi Lampung	Menengah Provinsi Lampung
11	Dinas Penanaman Modal	Drs. INTIZAM		DEFTUMAN	
1	dan Pelayanan Terpadu Satu	NIP.19660226 198610 1 001		NIP. 19631213 198912 1 001	
	Pintu Provinsi Lampung	Pembina Utama Muda/IVc		Penata Muda Tk.I/IIIb	1
		Kepala Dinas Penanaman Modal		Staf Sub Bagian Keuangan	-
	1	dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Dinas Penanaman Modal	
		Provinsi Lampung	1	dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	I
				Provinsi Lampung	
Ì				1	

•

NAMA SKPD	NAMA SKDD DENGGINA ANGGADAN KIJAGA DENGGINA ANGGADAN	BENDAHARA		
NAMA SAFD	PENGGUNA ANGGARAN	RUASA PENGGUNA ANGGARAN	PENGELUARAN	PENERIMAAN
2	3	4	5	6
Dinas Pemuda dan Olahraga	HANNIBAL, S.H., M.H.			RUSLI, S.E.
Provinsi Lampung	NIP. 19610831 198712 1 001		NIP. 19850527 200903 2 006	NIP. 19670618 199103 1 004
1	Pembina Utama Madya/IVd		Pengatur/IIc	Penata Tk.I/IIId
	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga		Staf Dinas Pemuda dan Olahraga	Staf Dinas Pemuda dan Olahraga
	Provinsi Lampung		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung
Dinas Perpustakaan dan	HERLINA WARGANEGARA, S.E., M.M.		RIRIS REINATA, S.Sos.	TETTY VIOLENTA LUBIS
Kearsipan Provinsi Lampung	NIP. 19591214 199103 2 002		NIP.19740511 199803 2 003	NIP.19680521 199203 2 003
	Pembina Utama Madya/IVd		Penata Tk.I/IIId	Penata Tk.I/IIId
1	Kepala Dinas Perpustakaan dan		Staf Dinas Perpustakaan dan	Staf Dinas Perpustakaan dan
	Kearsipan Provinsi Lampung		Kearsipan Provinsi Lampung	Kearsipan Provinsi Lampung
Dinas Kelautan dan Perikanan	Dr. TOGA MAHAJI, A.Pi., M.M.		SUTARNA, S.E.	MEINA ROSA MAULIYANTI, S.H.
Provinsi Lampung	NIP. 19650610 199003 1 012	1	NIP. 19620530 199103 1 003	NIP. 19710512 200312 2 005
1	Pembina Tingkat I/IVb		Penata/IIIc	Penata Tk.I/IIId
1	Plt. Kepala Dinas Kelautan dan		Staf Sub Bagian Keuangan	Staf Sub Bagian Keuangan
	Perikanan Provinsi Lampung		Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Provinsi Lampung	Provinsi Lampung
Dinas Pariwisata	Drs. BUDIHARTO HN		SURYANI, S.H.	
Provinsi Lampung	NIP. 19590220 198503 1 004		NIP. 19681124 199403 2 003	
	· ·		Penata/IIIc	
ļ	Provinsi Lampung		Provinsi Lampung	
Dinas Tanaman Pangan dan	Ir. EDI YANTO, M.Si.		Drs. RIDHAM	YUNI PRASTYANINGSIH
Hortikultura Provinsi Lampung		Ì		NIP. 19820629 200903 2 008
	- ·		·	Pengatur/IIc
	~		_	Staf Dinas Tanaman Pangan dan
	Hortikultura Provinsi Lampung		Hortikultura Provinsi Lampung	Hortikultura Provinsi Lampung
	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung  Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung  Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung  Dinas Pariwisata Provinsi Lampung	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung  HANNIBAL, S.H., M.H.  NIP. 19610831 198712 1 001 Pembina Utama Madya/IVd Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung  Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung  HERLINA WARGANEGARA, S.E., M.M.  NIP. 19591214 199103 2 002 Pembina Utama Madya/IVd Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung  Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung  Dr. TOGA MAHAJI, A.Pi., M.M.  NIP. 19650610 199003 1 012 Pembina Tingkat I/IVb Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung  Dinas Pariwisata Drs. BUDIHARTO HN NIP. 19590220 198503 1 004 Pembina Utama Madya/IVd Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung  Dinas Tanaman Pangan dan  Ir. EDI YANTO, M.Si.	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung  HANNIBAL, S.H., M.H.  NIP. 19610831 198712 1 001 Pembina Utama Madya/IVd Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung  Dinas Perpustakaan dan  Kearsipan Provinsi Lampung  Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung  Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung  Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung  Dinas Pariwisata  Dr. TOGA MAHAJI, A.Pi., M.M.  NIP. 19650610 199003 1 012 Pembina Tingkat I/IVb Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung  Dinas Pariwisata  Drs. BUDIHARTO HN Provinsi Lampung  Dinas Pariwisata Provinsi Lampung  Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung  II. EDI YANTO, M.Si. Pembina Utama Madya/IVd Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung  III. EDI YANTO, M.Si. Pembina Utama Madya/IVd Kepala Dinas Tanaman Pangan dan	2 Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung Provinsi Lam

\	WANT A CUMP	DENCCINA ANCCADAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BEN	DAHARA
NO	NAMA SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	RUASA PENGGUNA ANGGARAN	PENGELUARAN	PENERIMAAN
1	2	3	4	5	6
25	Dinas Perkebunan dan	Ir. DESSY DESMANIAR ROMAS, M.M.		SYAMSUDIN, S.Sos.	IDRUS
	Peternakan Provinsi Lampung	NIP. 19581210 198303 2 010		NIP. 19630927 198803 1 005	NIP. 19650209 198903 1 002
ſ		Pembina Utama Madya/IVd	Ì	Penata Tk. I/IIId	Penata Muda Tk.I/IIIb
Į		Kepala Dinas Perkebunan dan		Staf Dinas Perkebunan dan	Staf Dinas Perkebunan dan
		Peternakan Provinsi Lampung		Peternakan Provinsi Lampung	Peternakan Provinsi Lampung
26	Dinas Kehutanan	Ir. SYAIFUL BACHRI, M.M.		DODY DARMAWAN, S.Hut., M.M.	KARLIAWAN
Ì	Provinsi Lampung	NIP. 19590930 198501 1 001		NIP. 19790316 200604 1 022	NIP. 19810820 200903 1 002
	1	Pembina Utama Madya/IVd	1	Penata/IIIc	Pengatur/Ilc
1	ļ	Kepala Dinas Kehutanan		Staf Sub Bagian Keuangan	Staf Sub Bagian Keuangan
1		Provinsi Lampung		Dinas Kehutanan Provinsi	Dinas Kehutanan Provinsi
				Lampung	Lampung
27	Dinas Energi dan Sumber Daya	Ir. PRIHATONO G ZAIN		YUNENDAR FREDY PUTRA, S.E.	
	Mineral Provinsi Lampung	NIP. 19630411 198802 1 002		NIP.19750625 200903 1 002	
		Pembina Utama Madya/IVd		Penata Muda Tk. I/IIIb	ļ
	i	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya	{	Staf Sub Bagian Keuangan	
		Mineral Provinsi Lampung	]	Dinas Energi dan Sumber Daya	İ
				Mineral Provinsi Lampung	
28	Dinas Perdagangan	Ir. FERYNIA		ELMA KAISI, S.E.	MULYANTO, S.E.
1	Provinsi Lampung	NIP. 19610208 198503 2 003		NIP. 19771215 200604 2 011	NIP. 19630310 198302 1 001
	-	Pembina Utama Muda/IVc		Penata Muda Tk. I/IIIb	Penata Tk.I/IIId
1		Kepala Dinas Perdagangan	1	Staf Dinas Perdagangan	Staf Dinas Perdagangan
		Provinsi Lampung		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung
29	Dinas Perindustrian	TONNY OL. TOBING, S.E., M.SP.		YULITA, S.Sos.	VERI AGUSGIARTI, S.H.
1	Provinsi Lampung	NIP. 19581112 198503 1 026		NIP. 19680730 198903 2 008	NIP. 19710814 199603 2 002
1		Pembina Utama Madya/IVd		Penata Tk. I/IIId	Penata Tk. I/IIId
		Kepala Dinas Perindustrian	1	Staf Dinas Perindustrian	Staf Dinas Perindustrian
		Provinsi Lampung		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung

			Terrica processor avecanous	BENDA	HARA
NO	NAMA SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PENGELUARAN	PENERIMAAN
1	2	3	4	5	6
30	Badan Perencanaan	Ir. TAUFIK HIDAYAT, M.M, M.EP.		MUJIYONO	
[	Pembangunan Daerah	NIP. 19601009 198603 1 011	Į.	NIP.19661228 199003 1 006	
	Provinsi Lampung	Pembina Utama Madya/IVd		Penata Muda/IIIa	
		Kepala Badan Perencanaan		Staf Badan Perencana Pembangunan	
		Pembangunan Daerah Provinsi Lampung		Daerah Provinsi Lampung	
31	Badan Keuangan Daerah	Drs. MINHAIRIN, M.M		VERAWATI KASIM, S.E., M.M.	
	Provinsi Lampung	NIP. 19620603 198511 1 001		NIP. 19780512 199803 2 001	
i 1		Pembina Utama Muda/IVc		Penata Tk. 1/IIId	
		Kepala Badan Keuangan Daerah		Staf Badan Keuangan Daerah	
[		Provinsi Lampung		Provinsi Lampung	
32	Badan Pendapatan Daerah	Ir. H.E. PITERDONO HZ, S.E., M.M.		DEWI PAMUNGKAS RATNA SARI, S.H.	NOVI ASTUTI, S.E.
	Provinsi Lampung	NIP. 19601122 198903 1 003		NIP.19770727 200501 2 012	NIP. 19771114 201101 2 003
	_	Pembina Utama Madya/IVd		Penata Tk. I/IIId	Penata Muda Tk.I/IIIb
		Kepala Badan Pendapatan Daerah		Staf Badan Pendapatan Daerah	Staf Badan Pendapatan Daerah
		Provinsi Lampung		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung
33	Badan Kepegawaian Daerah	RUSLI SYOFUAN, S.Sos, M.M.		TRIE SANDRA KESUMA, S.E.	
	Provinsi Lampung	NIP. 19690921 199903 1 007		NIP. 19790815 200903 2 005	
		Pembina Tingkat I/IVb	l	Penata Muda Tk.I/IIIb	
		Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah		Staf Badan Kepegawaian Daerah	
		Provinsi Lampung		Provinsi Lampung	
34	Badan Pengembangan Sumber	Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A.		SUPRAPTI, S.Sos., M.M.	
	Daya Manusia Daerah	NIP. 19641021 199003 1 008		NIP. 19690318 199402 2 001	
	Provinsi Lampung	Pembina Utama Madya/IVd		Penata Tk.I/IIId	
1		Kepala Badan Pengembangan Sumber	}	Staf Badan Pengembangan Sumber	
		Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung		Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung	
35	Badan Penelitian dan	Ir. MULYADI IRSAN, M.T.		CIK MARYA, S.E.	
	Pengembangan Daerah	NIP. 19670517 199303 1 011		NIP. 19691026 199203 2 002	
	Provinsi Lampung	Pembina Utama Madya/IVd		Penata Tk. I/IIId	
		Kepala Badan Penelitian dan		Staf Badan Penelitian dan Pengembangan	
		Pengembangan Daerah Provinsi Lampung	1	Daerah Provinsi Lampung	

,

.

NO	NAMA SKPD	AMA SKPD PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA	
	NAMA SKID	PENGGUNA ANGGARAN	RUASA PENGGUNA ANGGARAN	PENGELUARAN	PENERIMAAN
1	2	3	4	5	6
,					1
36	Badan Penanggulangan Bencana	Drs. SENA ADHI WITARTA, M.H.		YESI MEILIZA, A.Md.	
,	Daerah Provinsi Lampung	NIP. 19680728 199402 1 001		NIP. 19800501 200902 2 002	1
	}	Pembina Utama Madya/IVd		Penata Muda/IIIa	
		Kepala Badan Penanggulangan		Staf Badan Penanggulangan	
		Bencana Daerah Provinsi Lampung		Bencana Daerah Provinsi Lampung	
37	Badan Penghubung Provinsi	HERYANA ROMDHONY, S.Sos., M.E.		KOMSARI, S,Kom.	UJANG SULAIMAN
	Lampung di Jakarta	NIP. 19670101 199903 1 007	i	NIP. 19760715 200701 1 007	NIP. 19800216 200701 1 005
		Pembina/IVa	ļ	Penata Muda/IIIa	Pengatur/IIc
		Kepala Badan Penghubung Provinsi	ĺ	Staf Badan Penghubung Provinsi	Staf Badan Penghubung Provinsi
ļ		Lampung di Jakarta		Lampung di Jakarta	Lampung di Jakarta
20	Badan Kesatuan Bangsa dan	IRWAN SIHAR MARPAUNG		LIMI MUOVARAJAMUD DURAMIN O U	
	Politik Daerah			UMI MUSYAFA'ATUR RIFATIN, S.H.	
	Provinsi Lampung	NIP. 19620527 201410 1 001 Pembina Utama Madya/IVd	ł	NIP. 19770612 200701 2 028 Penata Muda/IIIa	
ļ	Provinsi Lampung	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan		Staf Badan Kesatuan Bangsa dan	
ı		Politik Daerah Provinsi Lampung	j	Politik Daerah Provinsi Lampung	
		Fontik Daeran Frovinsi Lampung		Foliak Daeran Flovinsi Lampung	}
	RSUD Dr. H. Abdul Moeloek	dr. HERY DJOKO SUBANDRIYO, MKM		RIDWAN HARTONO, S.Kep.	SILVA GUSMAN, S.E.
- 1	Provinsi Lampung	NIP. 19610426 199603 1 001	[	NIP. 19740909 199403 1 005	NIP. 19820825 201001 1 017
		Pembina Utama Muda/IVc		Penata/IIIc	Penata Muda Tk.I/IIIb
	1	Direktur Utama RSUD	j	Staf RSUD dr. H. Abdul Moeloek	Staf RSUD dr. H. Abdul Moeloek
		Dr. H. Abdul Moeloek		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung
40	Rumah Sakit Jiwa Daerah	dr. ANSYORI		SULISIA, S.Sos.	nani astuti, s.e.
	Provinsi Lampung	NIP. 19631108 200212 1 004		NIP. 19670909 199103 2 005	NIP. 19680707 198903 2 008
1	1	Pembina Tingkat I/IVb		Penata/IIIc	Penata Muda Tk.I/IIIb
	1	Direktur Rumah Sakit Jiwa		Staf Rumah Sakit Jiwa Daerah	Staf Rumah Sakit Jiwa Daerah
	}	Provinsi Lampung	(	Provinsi Lampung	Provinsi Lampung

•

NO	NAMA SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAI	HARA
NO		PENGGONA ANGGARAN	NOASA I ENGGUNA ANGGARAN	PENGELUARAN	PENERIMAAN
1	2	3	4	5	6
41	Badan Layanan Pengadaan	Drs. WIWIED PRIYANTO, M.IP.		ACHMAD ADENAN	
1	Barang dan Jasa Provinsi	NIP. 19730215 199303 1 006	1	NIP. 19710718 200701 1 005	
	Lampung	Pembina Tingkat I/IVb		Pengatur Tk. I/IId	
1		Sekretaris Badan Layanan Pengadaan		Pelaksana Pada Badan Layanan	
	İ	Barang dan Jasa Provinsi Lampung		Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi	
				Provinsi Lampung	
42	Badan Penyelenggara KORPRI	TIAS NUZIAR, S.H.		MULYONO, S.E.	
		NIP. 19591118 198703 1 007		NIP. 19751016 200701 1 015	
}		Pembina Utama Madya/IVd	ļ	Penata Muda/IIIa	
		Kepala Badan Penyelenggara KORPRI		Staf Badan Penyelenggara KORPRI	
		Provinsi Lampung		Provinsi Lampung	
43	Dinas Perumahan, Kawasan	Dr. EDARWAN, S.E., M.Si.		HERWANTORI, S.E.	
	Permukiman dan Pengelolaan	NIP. 19620404 198703 1 009	j	NIP. 19770820 199703 1 002	
	Sumber Daya Air	Pembina Utama Madya/IVd		Penata Muda Tk.I/IIIb	
1	Provinsi Lampung	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan		Staf Dinas Perumahan, Kawasan	
1	Ì	Permukiman dan Pengelolaan Sumber		Permukiman dan Pengelolaan	
	l	Daya Air Provinsi Lampung	1	Sumber Daya Air Provinsi Lampung	
			1		
	}				

GUBERNUR LAMPUNG,

M. AIDHO PICARDO

NO	NAMA SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAI	HARA
110		PENGGUNA ANGGARAN	TORBIT I INGGONII MIGGMAN	PENGELUARAN	PENERIMAAN
1	2	3	4	5	6
41	Badan Layanan Pengadaan	Drs. WIWIED PRIYANTO, M.IP.		ACHMAD ADENAN	
1	Barang dan Jasa Provinsi	NIP. 19730215 199303 1 006		NIP. 19710718 200701 1 005	
	Lampung	Pembina Tingkat I/IVb		Pengatur Tk. I/IId	
		Sekretaris Badan Layanan Pengadaan		Pelaksana Pada Badan Layanan	
ı		Barang dan Jasa Provinsi Lampung		Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi	
				Provinsi Lampung	
42	Badan Penyelenggara KORPRI	TIAS NUZIAR, S.H.		MULYONO, S.E.	
ì		NIP. 19591118 198703 1 007		NIP. 19751016 200701 1 015	
	Ì	Pembina Utama Madya/IVd		Penata Muda/IIIa	
		Kepala Badan Penyelenggara KORPRI		Staf Badan Penyelenggara KORPRI	
		Provinsi Lampung		Provinsi Lampung	
43	Dinas Perumahan, Kawasan	Dr. EDARWAN, S.E., M.Si.		HERWANTORI, S.E.	
Į.	Permukiman dan Pengelolaan	NIP. 19620404 198703 1 009		NIP. 19770820 199703 1 002	
	Sumber Daya Air	Pembina Utama Madya/IVd		Penata Muda Tk.I/IIIb	
	Provinsi Lampung	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan		Staf Dinas Perumahan, Kawasan	
		Permukiman dan Pengelolaan Sumber		Permukiman dan Pengelolaan	
1		Daya Air Provinsi Lampung		Sumber Daya Air Provinsi Lampung	
1					
1					

GUBERNUR LAMPUNG.

MARIBHO FICARDO